

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi hak jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers di Televisi Republik Indonesia Jawa Barat (TVRI Jawa Barat) dilakukan melalui dua cara. Pertama, dengan menyediakan alur pengajuan keberatan melalui Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik TVRI (PPID LPP TVRI). Kedua, pelaksanaan hak jawab juga dilakukan melalui *platform* media sosial dan website milik TVRI. Mekanisme pengajuan keberatan melalui PPID LPP TVRI dilakukan dalam empat tahap yang terdiri dari: a) Tahap penerimaan keberatan dari masyarakat atau pihak dalam pemberitaan; b) Tahap pemrosesan tanggapan dan masukan dari masyarakat; c) Tahap pemberian jawaban dan klarifikasi; d) Tahap publikasian tanggapan dan klarifikasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa TVRI Jawa Barat selalu membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan, saran ataupun permohonan penggunaan hak jawab dalam kaitannya terdapat pemberitaan yang merugikan pihak tertentu.
2. Kendala yang dialami oleh TVRI Jawa Barat dalam implementasi hak jawab adalah terkait ketersediaan sumber daya manusia yang disebabkan oleh lambatnya regenerasi staf di TVRI Jawa Barat. Lambatnya regenerasi ini menyebabkan kurangnya staf kompeten dan

berpengalaman dalam tubuh organisasi TVRI Jawa Barat terutama dalam hal ini kaitannya dengan staf yang ditugaskan dalam proses penanganan komplain atau permohonan hak jawab. Kurangnya jumlah staf kompeten inilah yang dapat memperlambat proses dan beresiko menimbulkan permasalahan dalam penanganan komplain atau permohonan hak jawab.

3. Strategi yang dilakukan oleh TVRI Jawa Barat dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasi hak jawab adalah: mempercepat proses regenerasi sumber daya manusia dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT). Langkah pengiriman para staf baru untuk mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) dapat mempercepat persiapan bagi para staf baru untuk menangani permasalahan komplain dan penggunaan hak jawab di TVRI Jawa Barat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada TVRI Jawa Barat untuk lebih memperhatikan para pegawai yang baru direkrut. Karena apabila terus menerus mengirim para pegawai menuju Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) akan memakan biaya yang besar juga. Maka lebih baik apabila ketika proses rekrutmen, TVRI Jawa Barat merubah kualifikasi bagi para pekerja yang akan diterima agar mengurangi intensitas mengirim pegawai baru untuk mengikuti PUSIDKLAT.